Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM); 7 (3), 2022 1-11
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM

Studi tentang faktor-faktor kendala dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah

Muhammad Nasir[1*], Aji Sofyan Effendi[2], Akhmad Noor[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan mengukur rasio efektivitas dan rasio kontribusi dari sumber-sumber PAD Kota Samarinda pada tahun 20015 sampai dengan 2019 serta wawancara dengan Pegawai Bapenda Sub Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Ibu Mudarwati, SE. mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemungutan PAD Kota Samarinda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PAD Kota Samarinda selama periode 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, efektivitas penerimaan PAD Kota Samarinda sudah berada pada tingkat yang sangat efektif. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD Kota Samarinda. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bapenda dalam meningkatkan penerimanaan PAD Kota Samarinda, diantaranya kendala dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, pemungutan Retribusi Pemakaian Fasilitas dan/atau Perlengkapan GOR Segiri, pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan PAD Kota Samarinda diantaranya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi Si-PATIN (Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi Secara Online) yang memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak serta pembayaran pajaknya.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah; rasio efektivitas; rasio kontribusi

The study on constraints factors in efforts to increase local own revenue

Abstract

The study was conducted by measuring the effectiveness ratio and contribution ratio from PAD sources in Samarinda City from 2001 to 2019 as well as interviews with Bapenda employees of the Data Collection and Management Sub-Sector, Mrs. Mudarwati, SE. regarding the factors that become obstacles in collecting PAD in Samarinda City. The test results show that the effectiveness of Samarinda City's PAD revenue during the 2015-2019 period tends to increase. From 2017 to 2019, the effectiveness of Samarinda City's PAD revenue has been at a very effective level. Local taxes are the source of income with the largest contribution to PAD revenue in Samarinda City. There are several obstacles faced by Bapenda in increasing Samarinda City PAD revenue, including obstacles in collecting Swallow's Nest Tax, collection of Retribution for Use of Segiri GOR Facilities and/or Equipment, collection of Market Service Retribution, collection of Parking Service Fees on Public Roads, and collection of Retribution for Building Permits. Efforts made by Bapenda to increase PAD revenue in Samarinda include implementing the Si-PATIN application (Online Integrated Regional Tax Information System) which makes it easy for taxpayers to report transactions and calculate taxes and pay taxes.

Keywords: *Local own revenue; effectiveness ratio; contribution ratio*

Copyright © 2022 Muhammad Nasir, Aji Sofyan Effendi, Akhmad Noor
✉ Corresponding Author
Email: nasirmuhammad1717@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahaanya serta meningkatkan akselerasi pembangunan didaerahnya dengan memaksimalkan fungsi keuangan daerahnya masing-masing. Menurut Halim & Iqbal (2012:24), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daeerah bila belum dimiliki ataupun dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Badrudin (2012:97), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Halim & Iqbal (2012:141), terdapat tiga struktur dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu: 1) Pendapatan Daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; 2) Belanja Daerah, yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal; dan 3) Pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah yang menjadi konsekuensi logis dari penerapan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2011:36).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan semakin sejahtera.

Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu kota terbesar dan terpenting di Kalimantan Timur bersama dengan Balikpapan dan Bontang. Sebagaimana Kota-Kota besar lainnya, sebagai daerah yang sudah menjalankan program otonomi lebih dari 20 tahun, Kota Samarinda tidak terlepas dari permasalahan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat selama beberapa tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda cenderung mengalami fluktuasi seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 PAD Kota Samarinda 2017-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektivitas PAD (%)
2017	507.247.746.809,00	517.499.223.222,34	102,02
2018	445.353.498.390,00	498.888.664.159,96	112,02
2019	500.991.118.323,22	560.444.857.362,80	111,87

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (2015-2019)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir PAD Kota Samarinda mengalami fluktuasi, sempat mengalami peningkatan di tahun 2018, PAD Kota Samarinda kembali mengalami penurunan di tahun 2019. Tidak hanya dari sisi jumlah realisasinya, PAD Kota Samarinda juga mengalami fluktuasi dari sisi efektivitasnya meskipun selalu melampaui angka 100%.

Padahal efektivitas merupakan sesuatu yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Senada dengan itu, untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontibusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dan kendala yang dihadapi dalam pemungutannya serta upaya Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2011:7-8).

Definisi Operasional

1. Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah tingkat pencapaian kerja Kota Samarinda dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah menggunakan indikator rasio efektifitas dan rasio kontribusi terhadap masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah selama periode 2015-2019.

a. Rasio Efektivitas

Menurut Halim & Kusufi (2013:134), efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan bisa dikatakan efektif apabila apa yang di hasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektivitas berarti bahwa tercapainya tujuan yang direncanakan. Untuk menghitung rasio efektivitas pemerintah daerah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Suatu pendapatan bisa dikatakan sangat efektif apabila mencapai rasio melebihi 100%. Apabila pencapaian rasionya semakin kecil maka menunjukkan pendapatan yang kurang efektif. Kriteria pengukuran rasio efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (1996)

b. Rasio Kontribusi

Menurut Fitra (2019:204), kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah. Untuk menghitung kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Sember Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \text{ x } 100\%$$

2. Kendala Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Kendala dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah hal-hal yang menghambat Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam melakukan pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama periode 2015-2019.

3. Upaya Meningkatkan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama periode 2015-2019.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Sumber data di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap informan, yaitu Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Sedangkan data sekunder adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh *Spradley* dinamakan "*social situation"* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat *(place)*, pelaku *(actors)* dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2011:215). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang memahami pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda secara utuh, yaitu Ibu Mudarwati, SE. yang berposisi di Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data BAPENDA Kota Samarinda.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti Kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011:222). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif *"the researcheris the key instrument".* Jadi peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada konsep Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (Sugiyono, 2011:243): 1) *Data Reduction* (Reduksi Data); 2) *Data Display* (Penyajian Data); dan 3) *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan).

Pemeriksaan Keabsahan Data

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul diuji keabsahan atau validitas datanya dengan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

Analisis kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dilakukan dengan menilai efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dan kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama periode 2015-2019.

1. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (%)

Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	**94.66**	**88.17**	**113.71**	**113.82**	**111.37**
Pajak Hotel	103.16	108.15	101.01	111.10	117.59
Pajak Restoran	106.81	98.72	101.01	108.83	115.96
Pajak Hiburan	88.63	99.49	111.77	110.66	108.49
Pajak Reklame	100.16	93.91	103.56	109.31	108.49
Pajak Penerangan Jalan	106.71	98.27	107.76	105.49	100.33
Pajak Parkir	93.70	105.44	91.09	105.50	104.83
Pajak Air Tanah	77.51	64.03	76.97	175.92	118.81
Pajak Sarang Burung Walet	14.82	68.95	11.72	35.14	31.24
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.71	4.70	13.36	121.57	69.25
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	75.79	106.16	92.35	115.98
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	45.38	59.26	176.88	151.78	130.43
Retribusi Daerah	**84.07**	**73.49**	**102.32**	**]79.07**	**92.79**
Retribusi Jasa Umum	57.51	55.83	112.37	74.57	114.63
Retribusi Jasa Usaha	126.70	108.03	94.24	60.95	94.94
Retribusi Perizinan Tertentu	91.47	67.90	93.14	100.16	64.86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	**22.93**	**82.29**	**72.25**	**97.73**	**95.47**
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	22.93	82.29	72.25	97.73	95.47
Lain-Lain PAD Yang Sah	**23.34**	**77.07**	**85.02**	**138.33**	**125.54**
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0.90	7.18	21.49	34.19	180.56
Penerimaan Jasa Giro	5.91	106.19	134.07	181.89	259.77
Penerimaan Bunga Deposito	31.95	-	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	69.57	49.79	50.39	154.01	25.68
Pendapatan Denda Pajak	57.14	140.17	183.48	148.60	185.04
Pendapatan Denda Retribusi	46.23	128.49	48.85	68.43	66.10
Pendapatan Dari Pengembalian	8.85	27.58	74.97	65.55	60.91
Pendapatan Dari Angsuran Atau Cicilan Penjualan	65.27	146.28	48.62	121.53	102.73
Pendapatan BLUD	82.23	54.54	110.01	112.89	97.67
Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir	86.28	-	-	-	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	-	-	-	144.33
Pengembalian Dana Kapitasi BOSDA	-	24.82	83.80	5.99	-
Penerimaan Lain-lain	31.56	70.65	53.71	74.04	180.03
Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	**51.22**	**83.39**	**102.02**	**112.02**	**111.87**

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda sebesar 51,22% dan berada pada tingkat yang tidak efektif. Pada tahun 2016 rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda meningkat menjadi sebesar 83,39% dan berada pada tingkat yang cukup

efektif. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019, rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda sudah berada pada tingkat yang sangat efektif dengan rasio efektivitas berturut-turut sebesar 102,02%, 112,02% dan 111,87%.

Rasio efektivitas Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir selalu berada pada tingkat yang efektif atau sangat efektif selama periode 2015-2019. Rasio efektivitas Pajak Air Tanah selama periode 2015-2017 berada pada tingkat yang kurang efektif. Namun pada tahun 2018 dan 2019, rasio efektivitas Pajak Air Tanah sudah berada pada tingkat yang sangat efektif. Rasio efektivitas Pajak Sarang Burung Walet selalu berada pada tingkat yang tidak efektif selama periode 2015-2019. Rasio efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama periode 2015-2017 berada pada tingkat yang tidak efektif. Namun pada tahun 2018, rasio efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah berada pada tingkat yang sangat efektif meskipun pada tahun 2019 rasio efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali berada pada tingkat yang kurang efektif. Pada tahun 2015, Kota Samarinda tidak menetapkan target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2016 berada pada tingkat yang kurang efektif. Sedangkan Pada tahun 2017-2019, rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berada pada tingkat yang efektif dan sangat efektif. Rasio efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2015 dan 2016 berada pada tingkat yang tidak efektif. Namun pada tahun 2016-2019, rasio efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berada pada tingkat yang sangat efektif.

Rasio efektivitas Retribusi Jasa Umum pada tahun 2015 dan 2016 berada pada tingkat yang tidak efektif. Meskipun sempat berada pada tingkat yang kurang efektif pada tahun 2018, rasio efektivitas Retribusi Jasa Umum berada pada tingkat yang sangat efektif pada tahun 2017 dan 2019. Rasio efektivitas Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2015 dan 2016 berada pada tingkat yang sangat efektif. Meskipun sempat berada pada tingkat yang kurang efektif pada tahun 2018, rasio efektivitas Retribusi Jasa Usaha berada pada tingkat yang efektif pada tahun 2017 dan 2019. Rasio efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2015 berada pada tingkat yang efektif. Pada tahun 2016 rasio efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu berada pada tingkat yang kurang efektif. pada tahun 2017 rasio efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu kembali berada pada tingkat yang efektif, bahkan pada tahun 2018 rasio efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu berada pada tingkat yang sangat efektif. Namun pada tahun 2019, rasio efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu kembali berada pada tingkat yang kurang efektif.

Rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2015 berada pada tingkat yang tidak efektif. Namun pada tahun 2016, rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berada pada tingkat yang cukup efektif. Pada tahun 2017 rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berada pada tingkat yang kurang efektif sebelum akhirnya pada tahun 2018 dan 2019, rasio efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sudah berada pada tingkat yang efektif. Rasio efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah pada tahun 2015 berada pada tingkat yang tidak efektif. Namun pada tahun 2016 dan 2017, rasio efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah berada pada tingkat yang cukup efektif. Pada tahun 2019 rasio efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah sudah berada pada tingkat yang sangat efektif.

2. Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4 Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (%)

Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	**58.15**	**65.44**	**57.74**	**70.72**	**66.02**
Pajak Hotel	4.92	6.63	4.98	5.79	6.08
Pajak Restoran	8.14	10.34	8.69	11.45	12.62
Pajak Hiburan	3.64	4.38	3.67	4.37	4.45
Pajak Reklame	1.79	1.80	1.31	1.44	1.42
Pajak Penerangan Jalan	19.96	23.10	19.16	21.36	19.69
Pajak Parkir	1.45	2.02	1.50	1.80	1.79

Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Air Tanah	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.03	0.01	0.00	0.02	0.56
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.94	8.71	7.49	7.13	8.24
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.27	8.43	10.94	17.34	11.13
Retribusi Daerah	**14.73**	**14.97**	**13.41**	**9.72**	**8.84**
Retribusi Jasa Umum	4.09	4.22	6.87	5.66	5.41
Retribusi Jasa Usaha	4.02	5.52	2.40	1.01	0.98
Retribusi Perizinan Tertentu	6.62	5.23	4.15	3.05	2.45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	**1.14**	**1.11**	**0.98**	**2.35**	**2.23**
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	1.14	1.11	0.98	2.35	2.23
Lain-Lain PAD Yang Sah	**25.98**	**18.48**	**27.87**	**17.21**	**22.92**
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0.45	0.02	0.03	0.01	0.03
Penerimaan Jasa Giro	0.44	1.09	1.04	1.46	2.09
Penerimaan Bunga Deposito	9.13	-	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0.25	0.20	0.10	0.31	0.05
Pendapatan Denda Pajak	0.88	0.81	0.80	0.68	0.75
Pendapatan Denda Retribusi	0.02	0.13	0.10	0.14	0.12
Pendapatan Dari Pengembalian	0.12	0.11	0.14	0.13	0.11
Pendapatan Dari Angsuran Atau Cicilan Penjualan	0.08	0.09	0.02	0.03	0.02
Pendapatan BLUD	7.63	6.88	6.38	8.15	10.63
Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir	0.02	-	-	-	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.75	3.14	-	3.88	3.61
Pengembalian Dana Kapitasi BOSDA	-	0.01	16.25	0.00	-
Penerimaan Lain-lain	4.21	5.99	3.01	2.44	5.52
Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis, sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda adalah Pajak Daerah yang memiliki kontribusi berkisar 57-70%. Terdapat empat komponen Pajak Daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, diantaranya: 1) Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi berkisar 19-23%; 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memiliki kontribusi berkisar 9-17%; 3) Pajak Restoran memiliki kontribusi berkisar 8-12%; dan 4) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi berkisar 7-8%. Sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar berikutnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda adalah Lain-Lain PAD Yang Sah yang memiliki kontribusi berkisar 17-25%. Komponen Lain-Lain PAD Yang Sah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda adalah Pendapatan BLUD yang memiliki kontribusi berkisar 6-10%. Sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar berikutnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda adalah Retribusi Daerah yang memiliki kontribusi berkisar 8-14%. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan melalui Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD hanya berkontribusi kurang dari 3% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Kendala Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

Berikut ini hasil wanwancara dengan Pegawai BAPENDA Sub Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Ibu Mudarwati, SE. mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

"Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a) *Pajak Sarang Burung Walet, dimana:*
   1. *Sulitnya memantau masa panen sarang burung walet dan pendistribusiannya,*
   2. *Sulitnya mengetahui omset dari penjualan sarang burung walet, dan*
   3. *Minimnya data wajib pajak sarang burung walet.*
b) *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana kebutuhan pemakaian tanah urug dan batuan untuk pembangunan jalan tol Balsam dibawah proyeksi.*
c) *Retribusi Daerah, dimana:*
   1. *Kendala bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana:*
      a. *Retribusi Pemakaian Tanah diatas HPL Milik Pemkot Samarinda yang berada di Citra Niaga mengalami penurunan pengunjung sehingga menyebabkan banyak penunggakan pembayaran oleh penerima HGB.*
      b. *Retribusi Pemakaian Rumah Dinas yang terkendala masih banyaknya penempatan rumah dinas oleh pensiuanan PNS.*
   2. *Kendala bagi Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana untuk pemungutan Retribusi Pemakaian Fasilitas dan/atau Perlengkapan GOR Segiri masih terkendala oleh keberatan yang diajukan penyewa atas tarif ruko yang dibebankan dalam Perda, serta pengajuan keringanan atas utang retribusi mereka, dimana saat ini jumlah piutang atas sewa fasilitas dan/atau perlengkapan GOR Segiri mencapai 1,65 Milyar Rupiah.*
   3. *Kendala bagi Dinas Perdagangan, dimana dimana untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar masih terhambat oleh proses rehabilitasi bangunan pasar.*
   4. *Kendala bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, dimana untuk pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus masih terkendala pada kendaraan yang tidak dapat menjangkau jalan-jalan kecil sehingga pemungutannya tidak maksimal.*
   5. *Kendala bagi Dinas Perhubungan, dimana:*
      a. *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dimana: Masih kurangnya personil untuk pengawasan dan penertiban; Adanya penolakan dari pemilik atau pelaku usaha terhadap penempatan juru parker resmi maupun juru parker binaan di lokasi tertentu; dan Kurang optimalnya fungsi karcis sebagai bukti pungut dikarenakan kesadaran masyarakat untuk meminta karcis masih kurang.*
      b. *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Darat, dimana: Adanya kendaraan yang tidak taat uji; dan Banyaknya perusahaan tambang yang tutup sehingga kendaraan mereka tidak beroperasi dan diuji kembali.*
   6. *Kendala bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana terdapat beberapa peraturan yang menyebabkan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak maksimal diantaranya:*
      a. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 156, Ayat 4, Huruf b, menyebutkan bahwa: "Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya".*
      b. *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 40, Ayat 1, menyebutkan bahwa: "Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya".*
      c. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 19, menyebutkan bahwa: "Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah".*
      d. *Adanya Peninjauan Kembali RT/RW Kota Samarinda 2014-2034, yang menyebabkan investor terhambat dan bahkan tidak dapat berinvestasi di Kota Samarinda karena*

pembangunan infrastruktur gedung yang berpotensi menjadi sumber pendapatan retribusi tidak terealisasi."

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

Berikut ini hasil wanwancara dengan Pegawai BAPENDA Sub Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Ibu Mudarwati, SE. mengenai upaya yang dilakukan BAPENDA untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

"Potensi terbesar sumber PAD Kota Samarinda berada pada sektor pajak dan retribusi daerah. Adapun upaya BAPENDA untuk memaksimalkan sumber PAD Kota Samarinda antara lain:

a) Tahun 2019 mulai diimplementasikan aplikasi system informasi pajak derah yang terintegrasi secara online, baik eSPTPD maupun sitem pelaporannya, yaitu Si-PATIN.
b) Pemutakhiran data obyek pajak daerah dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di Wilayah Kota Samarinda.
c) Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak daerah yang bersifat pajak self assessment agar SPTPD yang disampaikan sesuai dengan yang diterima.
d) Optimalisasi Pajak Daerah melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) serta menjalin kerjasama dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).
e) Melakukan kerjasama pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia.
f) Menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia melalui program Cash Management System (CMS).
g) Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka informasi data BPHTB dan data pertanahan."

Pembahasan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama periode 2015-2019 menggunakan rasio efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan dengan target yang ditetapkan. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Bapenda dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda serta upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa selama periode 2015-2019 rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda cenderung mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2015 efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda berada pada tingkat yang tidak efektif, pada tahun 2016 efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda mengalami perbaikan dan berada pada tingkat yang cukup efektif. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda sudah berada pada tingkat yang sangat efektif.

Semakin efektifnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tidak terlepas dari keefektifan pemungutan Pajak Daerah di Kota Samarinda. Tercatat selama beberapa tahun terakhir efektivitas pemungutan pajak daerah berada pada tingkat yang efektif dan sangat efektif. Apalagi pajak daerah merupakan sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Secara umum Pajak Daerah menyumbang penerimaan 57% sampai dengan 70% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Terdapat empat komponen Pajak Daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, diantaranya: 1) Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi berkisar 19-23%; 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memiliki kontribusi berkisar 9-17%; 3) Pajak Restoran memiliki kontribusi berkisar 8-12%; dan 4) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi berkisar 7-8%. Keempat komponen pajak daerah tersebut memiliki efektivitas yang cukup baik dalam pemungutannya. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran misalnya, selama periode 2015-2019 selalu berada pada tingkat yang efektif dan sangat efektif.

Menurut Bapenda Kota Samarinda, meskipun efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda mengalami perbaikan selama beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa sumber penerimaan yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

Samarinda, diantaranya adalah Pajak Sarang Burung Walet, dimana Bapenda mengalami kesulitan untuk memantau masa panen sarang burung walet dan pendistribusiannya. Bapenda juga mengalami kesulitan untuk mengukur omset yang diperoleh dari penjualan sarang burung walet serta minimnya data wajib pajak sarang burung walet yang dimiliki oleh Bapenda.

Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam pemungutan retribusi daerah di Kota Samarinda. Pemungutan Retribusi Pemakaian Fasilitas dan/atau Perlengkapan GOR Segiri oleh Dinas Pemuda dan Olahraga mengalami kendala yang masih terkendala oleh keberatan yang diajukan penyewa atas tarif ruko yang dibebankan dalam Perda, serta pengajuan keringanan atas utang retribusi mereka, dimana saat ini jumlah piutang atas sewa fasilitas dan/atau perlengkapan GOR Segiri mencapai 1,65 Milyar Rupiah. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar oleh Dinas Perdagangan yang masih terhambat proses rehabilitasi bangunan pasar. Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan yang terkendala karena kurangnya personil untuk pengawasan dan penertibandi areal parkir. Juga terdapat penolakan dari pemilik atau pelaku usaha terhadap penempatan juru parkir resmi maupun juru parkir binaan di lokasi tertentu serta kurang optimalnya fungsi karcis sebagai bukti pungut dikarenakan kesadaran masyarakat untuk meminta karcis masih kurang. Begitu pula pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana terdapat beberapa peraturan pemerintah yang justru menyebabkan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak maksimal.

Adapun upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda diantaranya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi sistem informasi pajak derah yang terintegrasi secara online, yaitu Si-PATIN. Si-PATIN (Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi Secara Online) merupakan aplikasi berbasis webservice yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB, memberikan kemudahan pada para wajib pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak BPHTB secara online, memberikan kemudahan pada para wajib pajak untuk membayar pajaknya secara online melalui Teller/ATM dan atau selainnya tanpa perlu mengantri di bapenda dan dapat diakses selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

Selain itu Bapenda melakukan pemutakhiran terhadap data obyek pajak daerah dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di Wilayah Kota Samarinda, serta terus berupaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak daerah yang bersifat pajak *self assessment* agar SPTPD yang disampaikan sesuai dengan yang diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda berdasarkan rasio efektivitasnya selama periode 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda sudah berada pada tingkat yang sangat efektif. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Secara umum Pajak Daerah menyumbang penerimaan 57% sampai dengan 70% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bapenda dalam meningkatkan penerimanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, diantaranya kendala dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, pemungutan Retribusi Pemakaian Fasilitas dan/atau Perlengkapan GOR Segiri, pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda diantaranya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi Si-PATIN (Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi Secara Online) yang memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak serta pembayaran pajaknya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui Bapenda diharapkan untuk dapat mempertahankan efektivitas penerimanan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang sudah berjalan sangat efektif.
2. Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui Bapenda diharapkan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan Pajak Daerah sebagai sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui Bapenda diharapkan untuk dapat meningkatkan Retribusi Daerah sebagai sumber potensial penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
4. Pemerintah Daerah Kota Samarinda diharapkan untuk membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, pemungutan Retribusi Pemakaian Fasilitas dan/atau Perlengkapan GOR Segiri, pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2015-2019*.

Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: IRDH (International Research and Development for Human Beings).

Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Dalam Negeri. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambunan, T. (2011). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.